



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.
2. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan untuk:
 - a. pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari:
 1. penerimaan dalam negeri; dan/atau
 2. pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal;
 - b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, dalam hal dipersyaratkan;
 - c. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah;
 - d. pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat;
 - e. pertimbangan dalam pemberian persetujuan pembentukan dana abadi daerah;
 - f. pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan;
 - g. pertimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur; dan
 - h. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai formula penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan formula tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai formula Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai formula penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai formula penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru di wilayah Papua yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah terendah pada daerah otonom induk.

Pasal 9

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

X

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

A. PENGHITUNGAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

1. Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$KFD_{provinsi-i} =$ [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] -
[pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan +
belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]
dengan penjabaran sebagai berikut:

$KFD_{provinsi-i} =$ [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI +
DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]

Keterangan:

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi;
PAD = pendapatan asli daerah;
TKD = transfer ke daerah;
PTAD = pendapatan transfer antar daerah;
LLPS = lain-lain pendapatan daerah yang sah;
SiLPA = sisa lebih perhitungan anggaran;
OTSUS = dana otonomi khusus;
DTI = dana tambahan infrastruktur;
DAIS = dana keistimewaan;
BP = belanja pegawai;
BBH = belanja bagi hasil;
BB = belanja bunga;
PUD = pembiayaan utang daerah.

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$RKFD_{provinsi-i} = \frac{KFD_{provinsi-i}}{Belanja\ Pegawai_{provinsi-i}}$

Keterangan:

$RKFD_{provinsi-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi;
 $KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi;
 $Belanja\ Pegawai_{provinsi-i}$ = Belanja Pegawai suatu provinsi.

Berdasarkan hasil penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi, daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,119	sangat rendah
1,119 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,656	rendah
1,656 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 2,193	sedang
2,193 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 2,730	tinggi
2,730 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	sangat tinggi

2. Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota
 Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i} = [\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]$
 dengan penjabaran sebagai berikut:

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DD + ADD + BP + BBH + BB + \text{Pembayaran Pokok PUD}]$$

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
 PAD = pendapatan asli daerah;
 TKD = transfer ke daerah;
 PTAD = pendapatan transfer antar daerah;
 LLPS = lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 SiLPA = sisa lebih perhitungan anggaran;
 OTSUS = dana otonomi khusus;
 DTI = dana tambahan infrastruktur;
 DD = dana desa;
 ADD = alokasi dana desa;
 BP = belanja pegawai;
 BBH = belanja bagi hasil;
 BB = belanja bunga;
 PUD = pembiayaan utang daerah.

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
 $KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
 $Belanja Pegawai_{kabupaten/kota-i}$ = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 0,905	sangat rendah
$0,905 \leq$ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,141	rendah
$1,141 \leq$ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,378	sedang
$1,378 \leq$ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,615	tinggi
$1,615 \leq$ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	sangat tinggi

B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1	Provinsi Aceh	0,849	Sangat Rendah
2	Provinsi Sumatera Utara	2,351	Tinggi
3	Provinsi Sumatera Barat	1,151	Rendah
4	Provinsi Riau	2,074	Sedang
5	Provinsi Jambi	1,542	Rendah
6	Provinsi Sumatera Selatan	1,894	Sedang
7	Provinsi Bengkulu	1,227	Rendah
8	Provinsi Lampung	1,671	Sedang
9	Provinsi DKI Jakarta	2,702	Tinggi
10	Provinsi Jawa Barat	2,142	Sedang
11	Provinsi Jawa Tengah	1,708	Sedang
12	Provinsi DI Yogyakarta	1,246	Rendah
13	Provinsi Jawa Timur	1,811	Sedang
14	Provinsi Kalimantan Barat	1,769	Sedang
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3,431	Sangat Tinggi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2,617	Tinggi
17	Provinsi Kalimantan Timur	3,497	Sangat Tinggi
18	Provinsi Sulawesi Utara	1,119	Rendah
19	Provinsi Sulawesi Tengah	1,362	Rendah
20	Provinsi Sulawesi Selatan	1,336	Rendah
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	1,081	Sangat Rendah
22	Provinsi Bali	1,471	Rendah
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,241	Rendah
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,221	Rendah
25	Provinsi Maluku	1,360	Rendah
26	Provinsi Papua	1,853	Sedang
27	Provinsi Maluku Utara	1,460	Rendah
28	Provinsi Banten	2,289	Tinggi
29	Provinsi Bangka Belitung	1,651	Rendah
30	Provinsi Gorontalo	1,279	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
31	Provinsi Kepulauan Riau	1,432	Rendah
32	Provinsi Papua Barat	2,782	Sangat Tinggi
33	Provinsi Sulawesi Barat	1,241	Rendah
34	Provinsi Kalimantan Utara	2,431	Tinggi
35	Provinsi Papua Selatan	1,853	Sedang
36	Provinsi Papua Tengah	1,853	Sedang
37	Provinsi Papua Pegunungan	1,853	Sedang
38	Provinsi Papua Barat Daya	1,853	Sedang

2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1	Kab. Aceh Barat	0,936	Rendah
2	Kab. Aceh Besar	1,048	Rendah
3	Kab. Aceh Selatan	1,445	Tinggi
4	Kab. Aceh Singkil	0,831	Sangat Rendah
5	Kab. Aceh Tengah	0,806	Sangat Rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	1,135	Rendah
7	Kab. Aceh Timur	0,643	Sangat Rendah
8	Kab. Aceh Utara	0,929	Rendah
9	Kab. Bireuen	0,963	Rendah
10	Kab. Pidie	0,712	Sangat Rendah
11	Kab. Simeulue	0,803	Sangat Rendah
12	Kota Banda Aceh	1,223	Sedang
13	Kota Sabang	1,164	Sedang
14	Kota Langsa	1,172	Sedang
15	Kota Lhokseumawe	0,974	Rendah
16	Kab. Gayo Lues	1,146	Sedang
17	Kab. Aceh Barat Daya	1,302	Sedang
18	Kab. Aceh Jaya	0,960	Rendah
19	Kab. Nagan Raya	1,195	Sedang
20	Kab. Aceh Tamiang	0,996	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
21	Kab. Bener Meriah	0,917	Rendah
22	Kab. Pidie Jaya	1,233	Sedang
23	Kota Subulussalam	1,298	Sedang
24	Kab. Asahan	1,049	Rendah
25	Kab. Dairi	0,931	Rendah
26	Kab. Deli Serdang	1,549	Tinggi
27	Kab. Karo	0,908	Rendah
28	Kab. Labuhanbatu	1,170	Sedang
29	Kab. Langkat	1,088	Rendah
30	Kab. Mandailing Natal	0,860	Sangat Rendah
31	Kab. Nias	1,480	Tinggi
32	Kab. Simalungun	0,943	Rendah
33	Kab. Tapanuli Selatan	1,556	Tinggi
34	Kab. Tapanuli Tengah	1,092	Rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,725	Sangat Rendah
36	Kab. Toba	1,265	Sedang
37	Kota Binjai	0,940	Rendah
38	Kota Medan	2,766	Sangat Tinggi
39	Kota Pematang Siantar	1,001	Rendah
40	Kota Sibolga	1,305	Sedang
41	Kota Tanjung Balai	1,308	Sedang
42	Kota Tebing Tinggi	1,077	Rendah
43	Kota Padang Sidempuan	1,353	Sedang
44	Kab. Pakpak Bharat	1,469	Tinggi
45	Kab. Nias Selatan	1,555	Tinggi
46	Kab. Humbang Hasundutan	0,959	Rendah
47	Kab. Serdang Bedagai	1,110	Rendah
48	Kab. Samosir	1,209	Sedang
49	Kab. Batu Bara	1,151	Sedang
50	Kab. Padang Lawas	0,997	Rendah
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,978	Rendah
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,238	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
53	Kab. Labuhanbatu Utara	1,160	Sedang
54	Kab. Nias Utara	1,221	Sedang
55	Kab. Nias Barat	1,180	Sedang
56	Kota Gunungsitoli	1,009	Rendah
57	Kab. Limapuluh Kota	0,529	Sangat Rendah
58	Kab. Agam	0,884	Sangat Rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	1,384	Tinggi
60	Kab. Padang Pariaman	0,685	Sangat Rendah
61	Kab. Pasaman	0,753	Sangat Rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	0,754	Sangat Rendah
63	Kab. Sijunjung	0,859	Sangat Rendah
64	Kab. Solok	0,775	Sangat Rendah
65	Kab. Tanah Datar	0,745	Sangat Rendah
66	Kota Bukittinggi	1,328	Sedang
67	Kota Padang Panjang	1,103	Rendah
68	Kota Padang	0,897	Sangat Rendah
69	Kota Payakumbuh	0,907	Rendah
70	Kota Sawahlunto	0,994	Rendah
71	Kota Solok	1,212	Sedang
72	Kota Pariaman	0,852	Sangat Rendah
73	Kab. Pasaman Barat	1,068	Rendah
74	Kab. Dharmasraya	0,851	Sangat Rendah
75	Kab. Solok Selatan	0,957	Rendah
76	Kab. Bengkalis	1,647	Sangat Tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	1,248	Sedang
78	Kab. Indragiri Hulu	1,354	Sedang
79	Kab. Kampar	1,140	Rendah
80	Kab. Kuantan Singingi	1,542	Tinggi
81	Kab. Pelalawan	1,711	Sangat Tinggi
82	Kab. Rokan Hilir	1,440	Tinggi
83	Kab. Rokan Hulu	1,155	Sedang
84	Kab. Siak	1,074	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
85	Kota Dumai	1,693	Sangat Tinggi
86	Kota Pekanbaru	2,272	Sangat Tinggi
87	Kab. Kepulauan Meranti	1,335	Sedang
88	Kab. Batang Hari	1,521	Tinggi
89	Kab. Bungo	1,266	Sedang
90	Kab. Kerinci	0,919	Rendah
91	Kab. Merangin	0,952	Rendah
92	Kab. Muaro Jambi	1,237	Sedang
93	Kab. Sarolangun	1,204	Sedang
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,695	Sangat Tinggi
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,467	Tinggi
96	Kab. Tebo	1,358	Sedang
97	Kota Jambi	1,423	Tinggi
98	Kota Sungai Penuh	1,063	Rendah
99	Kab. Lahat	1,860	Sangat Tinggi
100	Kab. Musi Banyuasin	1,679	Sangat Tinggi
101	Kab. Musi Rawas	1,356	Sedang
102	Kab. Muara Enim	1,513	Tinggi
103	Kab. Ogan Komering Ilir	1,145	Sedang
104	Kab. Ogan Komering Ulu	1,000	Rendah
105	Kota Palembang	1,349	Sedang
106	Kota Prabumulih	0,920	Rendah
107	Kota Pagar Alam	1,363	Sedang
108	Kota Lubuk Linggau	1,352	Sedang
109	Kab. Banyuasin	1,317	Sedang
110	Kab. Ogan Ilir	1,145	Sedang
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1,030	Rendah
112	Kab. Ogan Komering Ulu	1,149	Sedang
113	Kab. Empat Lawang	2,156	Sangat Tinggi
114	Kab. Penukal Abab Lematang	2,178	Sangat Tinggi
115	Kab. Musi Rawas Utara	2,723	Sangat Tinggi
116	Kab. Bengkulu Selatan	0,891	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
117	Kab. Bengkulu Utara	1,108	Rendah
118	Kab. Rejang Lebong	0,999	Rendah
119	Kota Bengkulu	0,975	Rendah
120	Kab. Kaur	1,152	Sedang
121	Kab. Seluma	0,951	Rendah
122	Kab. Mukomuko	1,368	Sedang
123	Kab. Lebong	1,400	Tinggi
124	Kab. Kepahiang	0,830	Sangat Rendah
125	Kab. Bengkulu Tengah	1,169	Sedang
126	Kab. Lampung Barat	0,967	Rendah
127	Kab. Lampung Selatan	1,175	Sedang
128	Kab. Lampung Tengah	0,756	Sangat Rendah
129	Kab. Lampung Utara	0,566	Sangat Rendah
130	Kab. Lampung Timur	1,003	Rendah
131	Kab. Tanggamus	1,024	Rendah
132	Kab. Tulang Bawang	1,046	Rendah
133	Kab. Way Kanan	1,013	Rendah
134	Kota Bandar Lampung	1,321	Sedang
135	Kota Metro	1,747	Sangat Tinggi
136	Kab. Pesawaran	1,004	Rendah
137	Kab. Pringsewu	0,760	Sangat Rendah
138	Kab. Mesuji	1,575	Tinggi
139	Kab. Tulang Bawang Barat	1,220	Sedang
140	Kab. Pesisir Barat	0,981	Rendah
141	Kab. Bandung	1,866	Sangat Tinggi
142	Kab. Bekasi	1,659	Sangat Tinggi
143	Kab. Bogor	2,070	Sangat Tinggi
144	Kab. Ciamis	0,853	Sangat Rendah
145	Kab. Cianjur	1,421	Tinggi
146	Kab. Cirebon	1,057	Rendah
147	Kab. Garut	0,909	Rendah
148	Kab. Indramayu	1,061	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
149	Kab. Karawang	1,671	Sangat Tinggi
150	Kab. Kuningan	0,757	Sangat Rendah
151	Kab. Majalengka	0,972	Rendah
152	Kab. Purwakarta	1,261	Sedang
153	Kab. Subang	1,361	Sedang
154	Kab. Sukabumi	1,625	Sangat Tinggi
155	Kab. Sumedang	1,011	Rendah
156	Kab. Tasikmalaya	1,067	Rendah
157	Kota Bandung	1,846	Sangat Tinggi
158	Kota Bekasi	1,692	Sangat Tinggi
159	Kota Bogor	1,554	Tinggi
160	Kota Cirebon	1,073	Rendah
161	Kota Depok	2,231	Sangat Tinggi
162	Kota Sukabumi	1,270	Sedang
163	Kota Tasikmalaya	1,085	Rendah
164	Kota Cimahi	1,201	Sedang
165	Kota Banjar	0,915	Rendah
166	Kab. Bandung Barat	1,118	Rendah
167	Kab. Pangandaran	0,940	Rendah
168	Kab. Banjarnegara	0,987	Rendah
169	Kab. Banyumas	0,959	Rendah
170	Kab. Batang	0,962	Rendah
171	Kab. Blora	1,003	Rendah
172	Kab. Boyolali	1,226	Sedang
173	Kab. Brebes	1,149	Sedang
174	Kab. Cilacap	1,049	Rendah
175	Kab. Demak	1,179	Sedang
176	Kab. Grobogan	0,998	Rendah
177	Kab. Jepara	1,012	Rendah
178	Kab. Karanganyar	1,016	Rendah
179	Kab. Kebumen	0,928	Rendah
180	Kab. Kendal	0,924	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
181	Kab. Klaten	1,057	Rendah
182	Kab. Kudus	1,231	Sedang
183	Kab. Magelang	0,993	Rendah
184	Kab. Pati	1,020	Rendah
185	Kab. Pekalongan	0,891	Sangat Rendah
186	Kab. Pemasang	0,746	Sangat Rendah
187	Kab. Purbalingga	0,792	Sangat Rendah
188	Kab. Purworejo	1,011	Rendah
189	Kab. Rembang	0,860	Sangat Rendah
190	Kab. Semarang	1,093	Rendah
191	Kab. Sragen	0,819	Sangat Rendah
192	Kab. Sukoharjo	1,067	Rendah
193	Kab. Tegal	1,200	Sedang
194	Kab. Temanggung	0,968	Rendah
195	Kab. Wonogiri	0,597	Sangat Rendah
196	Kab. Wonosobo	1,211	Sedang
197	Kota Magelang	1,662	Sangat Tinggi
198	Kota Pekalongan	1,366	Sedang
199	Kota Salatiga	1,586	Tinggi
200	Kota Semarang	2,341	Sangat Tinggi
201	Kota Surakarta	1,866	Sangat Tinggi
202	Kota Tegal	1,079	Rendah
203	Kab. Bantul	1,263	Sedang
204	Kab. Gunung Kidul	0,837	Sangat Rendah
205	Kab. Kulon Progo	1,102	Rendah
206	Kab. Sleman	1,546	Tinggi
207	Kota Yogyakarta	1,661	Sangat Tinggi
208	Kab. Bangkalan	1,031	Rendah
209	Kab. Banyuwangi	1,413	Tinggi
210	Kab. Blitar	1,268	Sedang
211	Kab. Bojonegoro	3,329	Sangat Tinggi
212	Kab. Bondowoso	0,957	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
213	Kab. Gresik	1,962	Sangat Tinggi
214	Kab. Jember	1,411	Tinggi
215	Kab. Jombang	1,262	Sedang
216	Kab. Kediri	1,516	Tinggi
217	Kab. Lamongan	1,365	Sedang
218	Kab. Lumajang	1,328	Sedang
219	Kab. Madiun	1,135	Rendah
220	Kab. Magetan	1,075	Rendah
221	Kab. Malang	1,191	Sedang
222	Kab. Mojokerto	1,342	Sedang
223	Kab. Nganjuk	1,095	Rendah
224	Kab. Ngawi	0,985	Rendah
225	Kab. Pacitan	0,872	Sangat Rendah
226	Kab. Pamekasan	1,161	Sedang
227	Kab. Pasuruan	1,541	Tinggi
228	Kab. Ponorogo	0,837	Sangat Rendah
229	Kab. Probolinggo	1,101	Rendah
230	Kab. Sampang	1,017	Rendah
231	Kab. Sidoarjo	1,540	Tinggi
232	Kab. Situbondo	1,403	Tinggi
233	Kab. Sumenep	1,184	Sedang
234	Kab. Trenggalek	0,829	Sangat Rendah
235	Kab. Tuban	1,387	Tinggi
236	Kab. Tulungagung	0,911	Rendah
237	Kota Blitar	1,925	Sangat Tinggi
238	Kota Kediri	1,466	Tinggi
239	Kota Madiun	1,468	Tinggi
240	Kota Malang	1,598	Tinggi
241	Kota Mojokerto	1,944	Sangat Tinggi
242	Kota Pasuruan	1,902	Sangat Tinggi
243	Kota Probolinggo	1,240	Sedang
244	Kota Surabaya	2,702	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
245	Kota Batu	1,684	Sangat Tinggi
246	Kab. Bengkayang	1,106	Rendah
247	Kab. Landak	1,101	Rendah
248	Kab. Kapuas Hulu	1,250	Sedang
249	Kab. Ketapang	1,164	Sedang
250	Kab. Mempawah	1,234	Sedang
251	Kab. Sambas	1,467	Tinggi
252	Kab. Sanggau	1,337	Sedang
253	Kab. Sintang	1,022	Rendah
254	Kota Pontianak	1,646	Sangat Tinggi
255	Kota Singkawang	1,249	Sedang
256	Kab. Sekadau	1,153	Sedang
257	Kab. Melawi	0,907	Rendah
258	Kab. Kayong Utara	1,416	Tinggi
259	Kab. Kubu Raya	1,212	Sedang
260	Kab. Barito Selatan	2,070	Sangat Tinggi
261	Kab. Barito Utara	2,934	Sangat Tinggi
262	Kab. Kapuas	1,856	Sangat Tinggi
263	Kab. Kotawaringin Barat	1,629	Sangat Tinggi
264	Kab. Kotawaringin Timur	1,199	Sedang
265	Kota Palangka Raya	1,257	Sedang
266	Kab. Katingan	1,792	Sangat Tinggi
267	Kab. Seruyan	1,878	Sangat Tinggi
268	Kab. Sukamara	1,788	Sangat Tinggi
269	Kab. Lamandau	1,420	Tinggi
270	Kab. Gunung Mas	1,211	Sedang
271	Kab. Pulang Pisau	1,777	Sangat Tinggi
272	Kab. Murung Raya	1,811	Sangat Tinggi
273	Kab. Barito Timur	1,411	Tinggi
274	Kab. Banjar	1,260	Sedang
275	Kab. Barito Kuala	1,272	Sedang
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,525	Tinggi

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	2,419	Sangat Tinggi
278	Kab. Hulu Sungai Utara	1,309	Sedang
279	Kab. Kotabaru	2,174	Sangat Tinggi
280	Kab. Tabalong	1,986	Sangat Tinggi
281	Kab. Tanah Laut	2,312	Sangat Tinggi
282	Kab. Tapin	4,191	Sangat Tinggi
283	Kota Banjarbaru	1,841	Sangat Tinggi
284	Kota Banjarmasin	2,175	Sangat Tinggi
285	Kab. Balangan	4,038	Sangat Tinggi
286	Kab. Tanah Bumbu	3,582	Sangat Tinggi
287	Kab. Berau	3,783	Sangat Tinggi
288	Kab. Kutai Kartanegara	2,122	Sangat Tinggi
289	Kab. Kutai Barat	1,518	Tinggi
290	Kab. Kutai Timur	2,809	Sangat Tinggi
291	Kab. Paser	2,720	Sangat Tinggi
292	Kota Balikpapan	2,834	Sangat Tinggi
293	Kota Bontang	2,499	Sangat Tinggi
294	Kota Samarinda	4,059	Sangat Tinggi
295	Kab. Penajam Paser Utara	1,788	Sangat Tinggi
296	Kab. Mahakam Ulu	6,951	Sangat Tinggi
297	Kab. Bolaang Mongondow	0,862	Sangat Rendah
298	Kab. Minahasa	0,917	Rendah
299	Kab. Kepulauan Sangihe	1,115	Rendah
300	Kota Bitung	1,254	Sedang
301	Kota Manado	1,462	Tinggi
302	Kab. Kepulauan Talaud	0,866	Sangat Rendah
303	Kab. Minahasa Selatan	1,082	Rendah
304	Kota Tomohon	1,370	Sedang
305	Kab. Minahasa Utara	1,192	Sedang
306	Kab. Kepulauan Siau	1,104	Rendah
307	Kota Kotamobagu	1,269	Sedang
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,078	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
309	Kab. Minahasa Tenggara	1,259	Sedang
310	Kab. Bolaang Mongondow	0,952	Rendah
311	Kab. Bolaang Mongondow	1,610	Tinggi
312	Kab. Banggai	1,103	Rendah
313	Kab. Banggai Kepulauan	1,165	Sedang
314	Kab. Buol	1,022	Rendah
315	Kab. Toli-Toli	0,939	Rendah
316	Kab. Donggala	1,076	Rendah
317	Kab. Morowali	2,482	Sangat Tinggi
318	Kab. Poso	0,901	Sangat Rendah
319	Kota Palu	1,547	Tinggi
320	Kab. Parigi Moutong	0,986	Rendah
321	Kab. Tojo Una-Una	1,245	Sedang
322	Kab. Sigi	0,919	Rendah
323	Kab. Banggai Laut	1,337	Sedang
324	Kab. Morowali Utara	1,314	Sedang
325	Kab. Bantaeng	1,182	Sedang
326	Kab. Barru	1,027	Rendah
327	Kab. Bone	1,014	Rendah
328	Kab. Bulukumba	1,066	Rendah
329	Kab. Enrekang	1,030	Rendah
330	Kab. Gowa	1,235	Sedang
331	Kab. Jeneponto	1,177	Sedang
332	Kab. Luwu	1,118	Rendah
333	Kab. Luwu Utara	1,075	Rendah
334	Kab. Maros	1,163	Sedang
335	Kab. Pangkajene dan	1,024	Rendah
336	Kota Palopo	0,966	Rendah
337	Kab. Luwu Timur	1,897	Sangat Tinggi
338	Kab. Pinrang	1,233	Sedang
339	Kab. Sinjai	0,747	Sangat Rendah
340	Kab. Kepulauan Selayar	1,203	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
341	Kab. Sidenreng Rappang	1,036	Rendah
342	Kab. Soppeng	0,984	Rendah
343	Kab. Takalar	0,842	Sangat Rendah
344	Kab. Tana Toraja	0,963	Rendah
345	Kab. Wajo	1,118	Rendah
346	Kota Parepare	1,321	Sedang
347	Kota Makassar	2,490	Sangat Tinggi
348	Kab. Toraja Utara	0,893	Sangat Rendah
349	Kab. Buton	1,075	Rendah
350	Kab. Konawe	0,901	Sangat Rendah
351	Kab. Kolaka	1,663	Sangat Tinggi
352	Kab. Muna	0,759	Sangat Rendah
353	Kota Kendari	1,078	Rendah
354	Kota Bau-bau	0,916	Rendah
355	Kab. Konawe Selatan	1,217	Sedang
356	Kab. Bombana	1,529	Tinggi
357	Kab. Wakatobi	1,367	Sedang
358	Kab. Kolaka Utara	1,078	Rendah
359	Kab. Konawe Utara	2,284	Sangat Tinggi
360	Kab. Buton Utara	1,252	Sedang
361	Kab. Konawe Kepulauan	2,619	Sangat Tinggi
362	Kab. Kolaka Timur	1,794	Sangat Tinggi
363	Kab. Muna Barat	1,396	Tinggi
364	Kab. Buton Tengah	1,333	Sedang
365	Kab. Buton Selatan	1,392	Tinggi
366	Kab. Badung	2,559	Sangat Tinggi
367	Kab. Bangli	1,050	Rendah
368	Kab. Buleleng	0,875	Sangat Rendah
369	Kab. Gianyar	2,076	Sangat Tinggi
370	Kab. Jembrana	1,292	Sedang
371	Kab. Karangasem	1,021	Rendah
372	Kab. Klungkung	1,192	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
373	Kab. Tabanan	1,081	Rendah
374	Kota Denpasar	1,358	Sedang
375	Kab. Bima	0,846	Sangat Rendah
376	Kab. Dompu	1,048	Rendah
377	Kab. Lombok Barat	0,843	Sangat Rendah
378	Kab. Lombok Tengah	0,886	Sangat Rendah
379	Kab. Lombok Timur	1,017	Rendah
380	Kab. Sumbawa	0,941	Rendah
381	Kota Mataram	1,544	Tinggi
382	Kota Bima	0,964	Rendah
383	Kab. Sumbawa Barat	1,653	Sangat Tinggi
384	Kab. Lombok Utara	1,388	Tinggi
385	Kab. Alor	1,016	Rendah
386	Kab. Belu	1,091	Rendah
387	Kab. Ende	0,985	Rendah
388	Kab. Flores Timur	0,990	Rendah
389	Kab. Kupang	1,252	Sedang
390	Kab. Lembata	0,756	Sangat Rendah
391	Kab. Manggarai	1,046	Rendah
392	Kab. Ngada	1,223	Sedang
393	Kab. Sikka	0,890	Sangat Rendah
394	Kab. Sumba Barat	1,854	Sangat Tinggi
395	Kab. Sumba Timur	1,188	Sedang
396	Kab. Timor Tengah Selatan	0,836	Sangat Rendah
397	Kab. Timor Tengah Utara	0,650	Sangat Rendah
398	Kota Kupang	0,972	Rendah
399	Kab. Rote Ndao	1,079	Rendah
400	Kab. Manggarai Barat	1,663	Sangat Tinggi
401	Kab. Nagekeo	0,851	Sangat Rendah
402	Kab. Sumba Barat Daya	1,637	Sangat Tinggi
403	Kab. Sumba Tengah	1,580	Tinggi
404	Kab. Manggarai Timur	1,213	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
405	Kab. Sabu Raijua	1,163	Sedang
406	Kab. Malaka	1,188	Sedang
407	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,275	Sedang
408	Kab. Maluku Tengah	1,067	Rendah
409	Kab. Maluku Tenggara	1,403	Tinggi
410	Kab. Buru	0,957	Rendah
411	Kota Ambon	1,251	Sedang
412	Kab. Seram Bagian Barat	0,997	Rendah
413	Kab. Seram Bagian Timur	0,986	Rendah
414	Kab. Kepulauan Aru	1,436	Tinggi
415	Kota Tual	1,593	Tinggi
416	Kab. Maluku Barat Daya	1,599	Tinggi
417	Kab. Buru Selatan	1,579	Tinggi
418	Kab. Biak Numfor	1,461	Tinggi
419	Kab. Jayapura	1,668	Sangat Tinggi
420	Kab. Kepulauan Yapen	1,080	Rendah
421	Kota Jayapura	1,124	Rendah
422	Kab. Sarmi	2,294	Sangat Tinggi
423	Kab. Keerom	1,299	Sedang
424	Kab. Waropen	2,230	Sangat Tinggi
425	Kab. Supiori	1,442	Tinggi
426	Kab. Mamberamo Raya	3,053	Sangat Tinggi
427	Kab. Halmahera Tengah	2,725	Sangat Tinggi
428	Kota Ternate	1,080	Rendah
429	Kab. Halmahera Barat	1,118	Rendah
430	Kab. Halmahera Timur	2,798	Sangat Tinggi
431	Kab. Halmahera Selatan	2,183	Sangat Tinggi
432	Kab. Halmahera Utara	2,049	Sangat Tinggi
433	Kab. Kepulauan Sula	1,610	Tinggi
434	Kota Tidore Kepulauan	1,553	Tinggi
435	Kab. Pulau Morotai	1,484	Tinggi
436	Kab. Pulau Taliabu	4,423	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
437	Kab. Lebak	0,908	Rendah
438	Kab. Pandeglang	0,808	Sangat Rendah
439	Kab. Serang	1,166	Sedang
440	Kab. Tangerang	1,861	Sangat Tinggi
441	Kota Cilegon	1,331	Sedang
442	Kota Tangerang	1,874	Sangat Tinggi
443	Kota Serang	0,988	Rendah
444	Kota Tangerang Selatan	2,434	Sangat Tinggi
445	Kab. Bangka	1,335	Sedang
446	Kab. Belitung	0,952	Rendah
447	Kota Pangkal Pinang	1,299	Sedang
448	Kab. Bangka Selatan	1,340	Sedang
449	Kab. Bangka Tengah	1,150	Sedang
450	Kab. Bangka Barat	1,457	Tinggi
451	Kab. Belitung Timur	1,107	Rendah
452	Kab. Boalemo	0,784	Sangat Rendah
453	Kab. Gorontalo	0,911	Rendah
454	Kota Gorontalo	1,243	Sedang
455	Kab. Pohuwato	0,937	Rendah
456	Kab. Bone Bolango	0,967	Rendah
457	Kab. Gorontalo Utara	0,818	Sangat Rendah
458	Kab. Natuna	1,038	Rendah
459	Kab. Kepulauan Anambas	0,839	Sangat Rendah
460	Kab. Karimun	1,765	Sangat Tinggi
461	Kota Batam	1,487	Tinggi
462	Kota Tanjung Pinang	1,101	Rendah
463	Kab. Lingga	1,450	Tinggi
464	Kab. Bintan	1,025	Rendah
465	Kab. Fakfak	1,462	Tinggi
466	Kab. Manokwari	1,256	Sedang
467	Kab. Teluk Bintuni	4,438	Sangat Tinggi
468	Kab. Teluk Wondama	1,800	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
469	Kab. Kaimana	2,040	Sangat Tinggi
470	Kab. Manokwari Selatan	2,188	Sangat Tinggi
471	Kab. Pegunungan Arfak	3,765	Sangat Tinggi
472	Kab. Majene	0,907	Rendah
473	Kab. Mamuju	1,233	Sedang
474	Kab. Polewali Mandar	0,884	Sangat Rendah
475	Kab. Mamasa	0,868	Sangat Rendah
476	Kab. Pasangkayu	1,408	Tinggi
477	Kab. Mamuju Tengah	1,569	Tinggi
478	Kab. Bulungan	1,707	Sangat Tinggi
479	Kab. Malinau	2,749	Sangat Tinggi
480	Kab. Nunukan	1,898	Sangat Tinggi
481	Kota Tarakan	1,403	Tinggi
482	Kab. Tana Tidung	2,470	Sangat Tinggi
483	Kab. Merauke	1,669	Sangat Tinggi
484	Kab. Boven Digoel	2,296	Sangat Tinggi
485	Kab. Mappi	1,697	Sangat Tinggi
486	Kab. Asmat	1,973	Sangat Tinggi
487	Kab. Mimika	3,354	Sangat Tinggi
488	Kab. Nabire	1,532	Tinggi
489	Kab. Paniai	1,635	Sangat Tinggi
490	Kab. Puncak Jaya	1,607	Tinggi
491	Kab. Dogiyai	3,031	Sangat Tinggi
492	Kab. Puncak	2,064	Sangat Tinggi
493	Kab. Intan Jaya	2,368	Sangat Tinggi
494	Kab. Deiyai	2,099	Sangat Tinggi
495	Kab. Jayawijaya	1,547	Tinggi
496	Kab. Yahukimo	2,399	Sangat Tinggi
497	Kab. Pegunungan Bintang	1,942	Sangat Tinggi
498	Kab. Tolikara	2,606	Sangat Tinggi
499	Kab. Mamberamo Tengah	2,283	Sangat Tinggi
500	Kab. Yalimo	1,939	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
501	Kab. Lanny Jaya	2,739	Sangat Tinggi
502	Kab. Nduga	5,192	Sangat Tinggi
503	Kab. Sorong	1,260	Sedang
504	Kota Sorong	1,202	Sedang
505	Kab. Raja Ampat	1,381	Tinggi
506	Kab. Sorong Selatan	0,995	Rendah
507	Kab. Maybrat	1,973	Sangat Tinggi
508	Kab. Tambrau	2,746	Sangat Tinggi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI